

PETUNJUK TEKNIS

**PELAKSANAAN KEGIATAN MATA KULIAH
PRAKTEK KERJA LAPANGAN BIDANG KEAHLIAN
(PKL-BK)**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
SEMESTER GENAP 2016/2017**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Hanya atas perkenan-Nya semata buku *Term Of Reference* Kegiatan Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan Bidang Keahlian (PKL-BK) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Buku ini merupakan petunjuk teknis bagi mahasiswa, dosen dan stakeholder terkait. Sebagai petunjuk teknis maka buku ini harus dimiliki, dipelajari dan dipahami dengan baik.

Tim penyusun menyadari buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Palangka Raya Juni 2017

Tim Penyusun

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa serta memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah proses agar manusia mampu mengaktualisasikan potensi seefektif mungkin (Universitas Palangka Raya, 2011). Sektor pendidikan merupakan sarana yang strategis dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di era global ini. Dengan demikian dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia yang terdidik, terlatih, berkualitas, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam proses pembangunan yang semakin kompleks dan mengarah pada profesionalisme.

Tuntutan kebutuhan sumber daya manusia tersebut sesuai pula dengan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yaitu *Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

Pendidikan tinggi berperan sebagai wadah formal untuk menerjemahkan tujuan pendidikan nasional yaitu (1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; (2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Universitas Palangka Raya sebagai lembaga Pendidikan dan Keilmuan yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan visinya yaitu *menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia bermutu, bermoral Pancasila, berdaya saing, dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penekanan pada daerah rawa gambut tropika serta daerah aliran sungai dan lingkungannya untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan* (Universitas Palangka Raya, 2011).

Seiring dengan semangat reformasi maka Universitas Palangka Raya dituntut untuk memaksimalkan perannya. Ditambah lagi dengan penerapan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, telah melahirkan kabupaten pemekaran yang sangat membutuhkan sumber daya manusia bagi pengembangan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pada sisi lain, tuntutan peningkatan sumber daya manusia yang handal dan profesional semakin diperlukan dalam menghadapi tantangan global yang penuh dengan persaingan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai lembaga pelayanan jasa pendidikan berupaya menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Tantangan yang semakin berat kedepan memerlukan keahlian dalam bidang pengetahuan sosial sebagai penyeimbang perkembangan pembangunan fisik dan teknologi. Hal ini otomatis akan berpotensi memberikan dampak perubahan terhadap kehidupan manusia.

Hadirnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Universitas Palangka Raya. Renstra itu ialah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Palangka Raya serta peranannya dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah (Universitas Palangka Raya, 2011). Selain itu, pengembangan sumber daya

manusia dengan berbagai disiplin ilmu termasuk bidang yang berkaitan dengan ilmu sosial dan politik, merupakan tuntutan dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia dalam proses pembangunan pada era otonomi daerah.

Salah satu upaya mempertajam kemampuan profesionalitas anak didik atau output baik pada penguasaan konsep/teori maupun praktek. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR menetapkan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan Bidang Keahlian (PKL-BK) dengan bobot kredit 3 (tiga) SKS sebagai bagian mata kuliah wajib. Diharapkan dengan adanya mata kuliah PKL-BK ini kualitas keluaran (*output*) baik secara teori maupun praktek akan lebih dapat ditingkatkan dan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman berharga sebelum secara nyata terjun di masyarakat.

A. Dasar Pelaksanaan PKL-BK

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 4 dan 5 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya

B. Tujuan Kegiatan

Mata kuliah Praktek Kerja Lapangan Bidang Keahlian (PKL-BK) dilaksanakan dan wajib ditempuh oleh semua mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR dengan maksud dan tujuan :

1. Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teori-teori yang telah dipelajari.
2. Menjadikan mahasiswa terampil dan profesional secara teori maupun praktek.

C. Output Kegiatan

Output kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Output minimal, mahasiswa mengetahui masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu pemerintahan pada instansi ia ditempatkan.
2. Output maksimal, mahasiswa mampu menganalisis masalah dan mengevaluasinya.

PENGELOLAAN PKL-BK

A. Organisasi Pengelola

Pelaksanaan PKL-BK secara umum dikelola oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan dan secara teknis dikoordinir oleh panitia yang dibentuk melalui rapat jurusan. Secara garis besar organisasi pengelola kegiatan PKL-BK adalah : (1) Dekan berfungsi sebagai pelindung dan penasehat dalam penyelenggaraan kegiatan PKL-BK; (2) Pembantu Dekan I berfungsi sebagai pengarah kegiatan PKL-BK; (3) Ketua Jurusan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, sebagai pengelola utama kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta melakukan koordinasi dengan pimpinan dan keluar; (4) Ketua Pelaksana bertindak sebagai ketua panitia dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan, juga melakukan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan PKL-BK yang antara lain meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; (5) Dosen Pembimbing berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan panitia dalam menyusun arah dan tema kegiatan, melaksanakan kegiatan, mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan laporan, melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa.

B. Administrasi

Administrasi kegiatan PKL-BK dibagi menjadi dua yaitu, administrasi secara akademik dan ketatausahaan. (1) Administrasi secara akademik meliputi rekaman mata kuliah PKL-BK dalam KRS dan penyelenggaraan administrasi sejak dari pendaftaran peserta, pembagian lokasi, pembekalan, daftar hadir mahasiswa dan pembimbing, nilai evaluasi materi pembekalan, kehadiran mahasiswa di lapangan, pembimbingan, nilai lapangan dan laporan, serta administrasi lainnya. (2) Ketatausahaan meliputi surat menyurat ke dalam (kepada pimpinan Fakultas), pembekalan PKL-BK, rapat-rapat dan sebagainya. Serta keluar, permohonan kepada instansi (SKPD) Pemerintah Daerah sebagai lokasi penempatan mahasiswa PKL-BK.

C. Pembiayaan

Sumber utama pembiayaan pelaksanaan kegiatan PKL-BK Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Palangka Raya Tahun 2017 dibebankan kepada DIPA FISIP Universitas Palangka Raya.

PERSIAPAN PKL-BK

A. Rapat Jurusan

Rapat Jurusan Ilmu Pemerintahan merupakan tahap awal untuk menghasilkan keputusan-keputusan tingkat jurusan yang berkaitan dengan kegiatan PKL-BK. Rapat yang dimaksud meliputi : rapat perencanaan PKL-BK, rapat penentuan tema PKL-BK, rapat penentuan lokasi kegiatan, rapat kegiatan pembekalan berkaitan dengan materi kegiatan pembekalan atau modul, dan rapat-rapat persiapan lainnya.

B. Persiapan Administrasi PKL-BK

Pada tahapan ini dilakukan persiapan administratif baik menyangkut surat menyurat, seperti : permohonan kepada SKPD, lembaga dan instansi Pemerintah dan Perwakilan lembaga negara di Provinsi

Kalimantan Tengah, Surat Tugas Dosen, Surat Keputusan Dekan FISIP, dan lainnya. Proses ini paling tidak dua bulan sebelum PKL-BK dilaksanakan.

PELAKSANAAN PKL-BK

Secara umum pelaksanaan kegiatan PKL-BK terintegrasi dengan kegiatan yang berlangsung pada masing-masing SKPD dan instansi. Artinya Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan setiap hari sesuai jam kerja yang berlaku pada dinas/badan/kantor mereka ditempatkan.

PKL-BK dilaksanakan selama 4 (empat) minggu dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

A. Pembekalan

Pembekalan adalah salah satu komponen vital dalam kegiatan PKL-BK, oleh karena itu didalam pembekalan harus ada kompetensi minimal. Kompetensi minimal yang harus dimiliki mahasiswa adalah mengetahui dan memahami :

1. Penyusunan Laporan PKL-BK;
2. Protokoler dan Kehumasan;
3. Administrasi Pemerintahan Umum dan Daerah;
4. Etika Birokrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima;
5. Birokrasi Pemerintahan Ideal & *Good Governance*; dan
6. Keuangan Negara & Daerah.

Pembekalan dilaksanakan pada minggu pertama selama minimal 1 hari dan maksimal 2 hari. Pemateri pembekalan diisi oleh orang yang memiliki kualifikasi akademik memadai dan berpengalaman praktis. Penunjukkan pemateri sepenuhnya tanggungjawab jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak terkait.

B. Pelepasan Peserta PKL-BK

Setelah menyelesaikan pembekalan peserta PKL-BK dilepaskan secara simbolis oleh unsur pimpinan fakultas/ jurusan dan diterima oleh perwakilan instansi tujuan. Peserta dibekali dengan buku TOR, *Name tag*, seragam, kertas kerja berupa *log book*, ATK dan kelengkapan lain yang dirasa perlu.

C. Mengikuti Kegiatan atau Program di Tempat PKL-BK

Mahasiswa ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan atau tugas yang diberikan kepadanya, sesuai arahan penanggung jawab instansi. Setiap kegiatan harian, dituangkan dalam *logbook*. Pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan mahasiswa juga sekaligus melakukan pengamatan terhadap semua aktivitas di unit mana ditempatkan dan mulai menginventarisir masalah yang ada. Masalah yang dimaksud disini adalah gap antara harapan dengan kenyataan yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

D. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan selama kegiatan, yaitu pada minggu ke-1 dan minggu ke-3. Monev dilaksanakan oleh unsur pimpinan fakultas bersama Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR, dan sekurang-kurangnya adalah Dosen Pembimbing. Hasil Monev menjadi dasar perbaikan dan pengembangan program PKL-BK pada tahun-tahun berikutnya. Monev sekurang-kurangnya dilaksanakan oleh satu orang perwakilan fakultas dan satu orang perwakilan jurusan.

E. Penyusunan Laporan dan Pembimbingan

Satu Minggu setelah berakhirnya PKL-BK adalah penyusunan laporan dan pembimbingan. Proses penyusunan laporan sudah didahului oleh proses konsultasi dengan dosen pembimbing sewaktu kegiatan PKL-BK berjalan atau sebelum berakhirnya kegiatan. Penyusunan laporan mengacu

pada buku TOR ini (sistematika laporan terlampir). Setiap dosen pembimbing diberikan tanggung jawab untuk mengarahkan dan membina mahasiswa/i bimbingannya dalam menyusun laporan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Setiap mahasiswa/i wajib melakukan konsultasi minimal 3 (tiga) kali pertemuan dengan dosen pembimbingnya berkaitan dengan laporan ini.

F. Penyerahan Nilai Akhir

Penyerahan nilai dilakukan dua minggu setelah PKL-BK berakhir, lebih tepatnya Tanggal 12 Agustus 2017.

PEDOMAN PENILAIAN

Penilaian kegiatan PKL-BK adalah akumulasi dari dua mekanisme penilaian, yaitu penilaian dari dosen pembimbing dan penilaian dari penanggung jawab instansi tujuan.

A. Penilaian dari dosen pembimbing

Penilaian dari dosen pembimbing berdasarkan pada hasil laporan akhir. Komponen yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah
2. Kemampuan paparan data gambaran umum dan pelaksanaan kegiatan
3. Kemampuan merumuskan temuan lapangan dan urgensi disiplin ilmu pemerintahan
4. Kemampuan menganalisis dan merumuskan kesimpulan

B. Penilaian dari penanggung jawab instansi

Penilaian dari penanggung jawab instansi tujuan berdasarkan pada perilaku sehari-hari selama mahasiswa/i berada pada lingkungan instansi yang bersangkutan. Komponen penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. Integritas
2. Kapabilitas
3. Tanggung jawab
4. Kerjasama
5. Inovasi
6. Motivasi
7. Dedikasi

C. *Scoring* dan bobot nilai

Nilai akhir peserta PKL-BK Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR adalah hasil penjumlahan nilai dari dosen pembimbing ditambah nilai dari penanggung jawab instansi dibagi dua. Dalam rumus dinyatakan:

$$NA = \frac{NDP + NPI}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NDP : Nilai dari Dosen Pembimbing

NPI : Nilai dari Penanggung Jawab Instansi

Selanjutnya berikut ini adalah pedoman angka dan bobot nilai sesuai dengan buku peraturan akademik Universitas Palangka Raya.

No.	Nilai			Keterangan
	Angka	Bobot	Huruf	
1	80 - 100	4	A	Pujian (lulus)
2	75 - 79	3,5	B+	Baik Sekali (lulus)
3	70 -74	3	B	Baik (lulus)
4	65 - 69	2,5	C+	Cukup Baik (lulus)
5	56 - 64	2	C	Cukup (lulus)
6	40 - 55	1	D	Kurang (lulus)
7	< 40	0	E	Kurng Sekali (lulus)

Sumber: Peraturan Akademik Universitas Palangka Raya, 2016

ATURAN, TATA TERTIB DAN SANKSI

Aturan dan tata tertib bagi peserta PKL-BK melekat dengan aturan dan tata tertib organisasi pada masing-masing SKPD mereka ditempatkan. Walaupun demikian ada beberapa aturan yang diatur secara teknis oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing SKPD. Aturan itu ialah sebagai berikut:

A. Pembekalan

Setiap peserta PKL-BK diwajibkan mengikuti pembekalan dari awal sampai akhir.

B. Jam masuk dan pulang di SKPD

Mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing SKPD.

C. Pakaian yang digunakan

a. Senin

Sepatu pantofel hitam, Celana kain hitam (pria)/ Rok kain hitam (wanita), Seragam dan Almamater.

b. Selasa

Sepatu pantofel hitam, Celana kain hitam (pria)/ Rok kain hitam (wanita), dan Kemeja putih lengan panjang.

c. Rabu

Sepatu pantofel hitam, Celana kain hitam (pria)/ Rok kain hitam (wanita), dan Kemeja putih lengan panjang.

d. Kamis

Sepatu pantofel Hitam, Celana kain hitam (pria)/ Rok kain hitam (wanita) dan baju batik Kalteng

e. Jum'at

Sepatu olahraga, celana olahraga dan baju bebas rapi (kaos berkerah).

D. Izin dan Berhalangan hadir

- a. Peserta PKL-BK tidak diperkenankan meninggalkan SKPD ia ditempatkan tanpa seizin penanggung jawab instansi.
- b. Peserta PKL-BK yang berhalangan hadir dengan alasan apapun diwajibkan menyertakan surat izin kepada instansi dengan tembusan dosen pembimbing.

E. Sanksi

Apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud di atas, sanksi terberat yang diberikan adalah “penundaan kelulusan”.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2003. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. www.dikti.go.id/uu20-2003sisdiknas. Diakses 09 maret 2014

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2012. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. www.dikti.go.id/uu12-2012pendidikantinggi. Diakses 09 maret 2014.

Universitas Palangka Raya, 2011. *Manual Mutu Universitas Palangka Raya*. Palangka Raya: Kantor Jaminan Mutu Universitas Palangka Raya.

Universitas Palangka Raya, 2011. *Manual Prosedur Universitas Palangka Raya*. Palangka Raya: Kantor Jaminan Mutu Universitas Palangka Raya.

Universitas Palangka Raya, 2011. *Kebijakan Akademik Universitas Palangka Raya*. Palangka Raya: Kantor Jaminan Mutu Universitas Palangka Raya.

Universitas Palangka Raya, 2011. *Peraturan Akademik Universitas Palangka Raya*. Palangka Raya: Kantor Jaminan Mutu Universitas Palangka Raya.

Lampiran 1. Form Penilaian Penanggung Jawab Instansi

**FORM PENILAIAN INSTANSI/LEMBAGA/SKPD
PRAKTEK KERJA LAPANGAN BIDANG KEAHLIAN (PKL-BK)
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UPR**

Instansi/Lembaga/SKPD :
Tahun Akademik : Genap 2016/2017

No	Nama Mahasiswa	NIM	Nilai/Komponen							Jumlah	Nilai Rata-rata	
			1	2	3	4	5	6	7		Angka	Huruf
1												
2												
3												
4												
5												

Aspek Penilaian		Skor Penilaian
1	Integritas	80-100 (A)
2	Kapabilitas	75-79 (B+)
3	Tanggung jawab	70-74 (B)
4	Kerjasama	65-69 (C+)
5	Inovasi	56-64 (C)
6	Motivasi	40-55 (D)
7	Dedikasi	<40 (E)

Palangka Raya, Juli 2017

Penanggung Jawab Instansi/Lembaga/SKPD ,

NIP.

Saran dan Masukan

Kepada Mahasiswa PKL :

Kepada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR :

Lampiran 2. Form Penilaian Dosen Pembimbing

FORM PENILAIAN DOSEN PEMBIMBING
PRAKTEK KERJA LAPANGAN BIDANG KEAHLIAN (PKL-BK)
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UPR

Instansi/Lembaga/SKPD :
 Tahun Akademik : Genap 2016/2017

No	Nama Mahasiswa	NIM	Nilai Komponen				Jumlah	Nilai Rata-rata	
			1	2	3	4		Angka	Huruf
1									
2									
3									
4									
5									

Aspek Penilaian		Skor Penilaian
1	Kesesuaian dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah	80-100 (A)
2	Kemampuan paparan data gambaran umum dan pelaksanaan kegiatan	75-79 (B+)
3	Kemampuan merumuskan temuan lapangan dan urgensi disiplin ilmu pemerintahan	70-74 (B)
4	Kemampuan menganalisis dan merumuskan kesimpulan	65-69 (C+)
		56-64 (C)
		40-55 (D)
		<40 (E)

Palangka Raya, Juli 2017

Dosen Pembimbing,

NIP.

Lampiran 3. Sistematika Laporan Kegiatan

HALAMAN SAMPUL (Lihat Lampiran)

HALAMAN PENGESAHAN (Lihat Lampiran)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM INSTANSI

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB IV. TEMUAN-TEMUAN LAPANGAN

BAB V. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 4. Halaman Sampul Depan

LAPORAN AKHIR

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN BIDANG KEAHLIAN (PKL-BK)
PADA BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH***

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
PKL-BK Semester Genap 2016/2017

NAMA
NIM



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
2017**

***(contoh, sesuaikan dengan nama tempat praktek)**

Lampiran 5

HALAMAN PENGESAHAN

(Judul)

- a. Nama Lengkap :
b. NIM :
c. Semester :
d. No. HP :
e. Email :
f. Instansi :
g. Alamat Instansi :
h. Lama Praktek : 03 s.d. 31 Juli 2017

Palangka Raya, 5 Agustus 2017

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa,

.....
NIP.

.....
NIM.

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan,

.....
NIP.